UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN DALAM PENGAWASAN TERHADAP CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA
IDRUS AL JUFRI, Dwi Haryati,S.H.,M.H
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum,* Cetakan Pertama, Renika Cipta, Jakarta.

Asikin, Zainal Amirudin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan,1997, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.

Harsono, Boedi, 1997, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

Herujito dan M Yayat, 2001, *Dasar – Dasar Manajemen,* Grasindo, Jakarta.

Julitriarsa, 1998, *Manajemen Umum,* BPPT, Yogyakarta.

MPA Siagian, 1986, *Filsafat Administrasi*, PT. Gunung Agung, Jakarta

Mulyadi dan Setiawan, 1999, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen,* Aditya Media, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum,*Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

P. S, Sigian, 2003, *Filsafat Administrasi,* Edisi Revisi, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Parlindungan, A. P, 1999, *Pendaftran Tanah di Indonesia,* CV. Mandar Maju, Bandung.

Perangin,Efendi, 1981, *Kumpulan Kuliah Pembuatan Akta*, Esa Suandi, Jakarta.

S, Pamudji, 1985, *Pembinaan Perkotaan di Indonesia,* Bina Aksara, Jakarta.

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi,* Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Sarwoto, 1968, *Dasar – Dasar Organisasi dan Manajemen,* Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN DALAM PENGAWASAN TERHADAP CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA
IDRUS AL JUFRI, Dwi Haryati,S.H.,M.H
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Soemitro, Hanitijo Ronny, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum,* Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekamto, Soejono dan Mamuji Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat,* Rajawali Press, Jakarta.

Soekanto, Soejono, 1986, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI-Press, Jakarta.

Sujanto, 1994, *Aspek – Aspek Pengawasan Di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta.

Sumarjono, S, W, Maria., 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi,* Bagian II, Penerbit Kompas, Jakarta.

Sutopo H. B.,1988, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif,* Bagian II, UNS Press, Surakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah dimuat dalam Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PERAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN DALAM PENGAWASAN TERHADAP CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA
IDRUS AL JUFRI, Dwi Haryati,S.H.,M.H
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.